



Hamengku Buwono X
Gubernur DIY

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020**



Paku Alam X
Wakil Gubernur DIY

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat DIY yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala* atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun 2020.

Penyusunan dan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab kami sebagai Gubernur kepada masyarakat DIY. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga merupakan tanggung jawab pelaksanaan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY bahwa Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DIY sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Daerah DIY. Visi Pembangunan DIY sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022, yaitu: **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam **“Lima Kemuliaan”** atau **“Panca Mulia”** yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan

3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sehingga *Panca Mulia* dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017-2022 sebagai berikut:

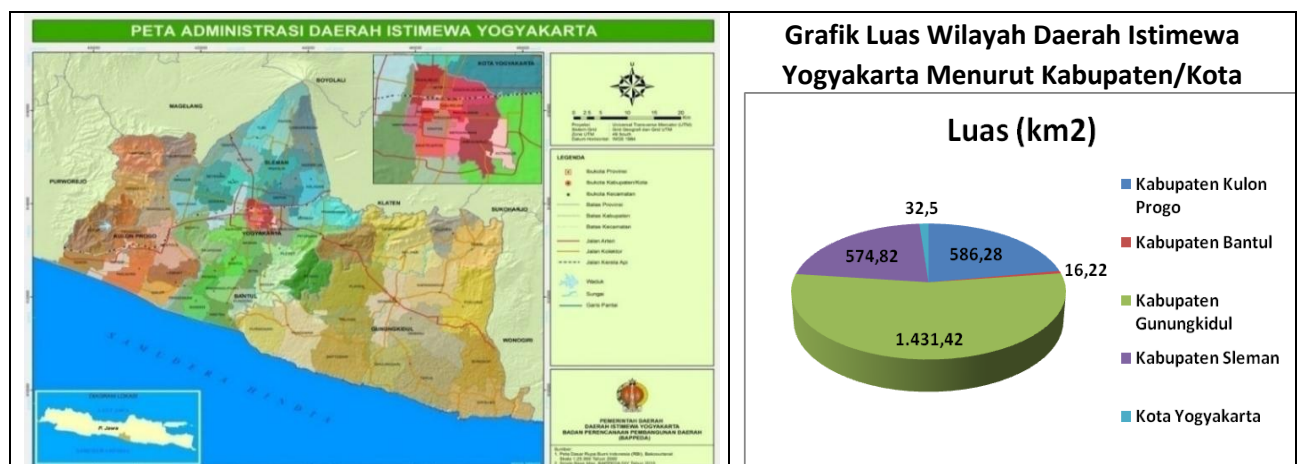
- 1) ***Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban***
- 2) ***Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Demokratis***

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2020 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selama tahun 2020 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

A. GAMBARAN UMUM:

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7^o.33'-8^o.12' Lintang Selatan dan 110^o.00'-110^o.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km² (18,71%)
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22%)
3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km² (45,69%)
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35%)
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04%)

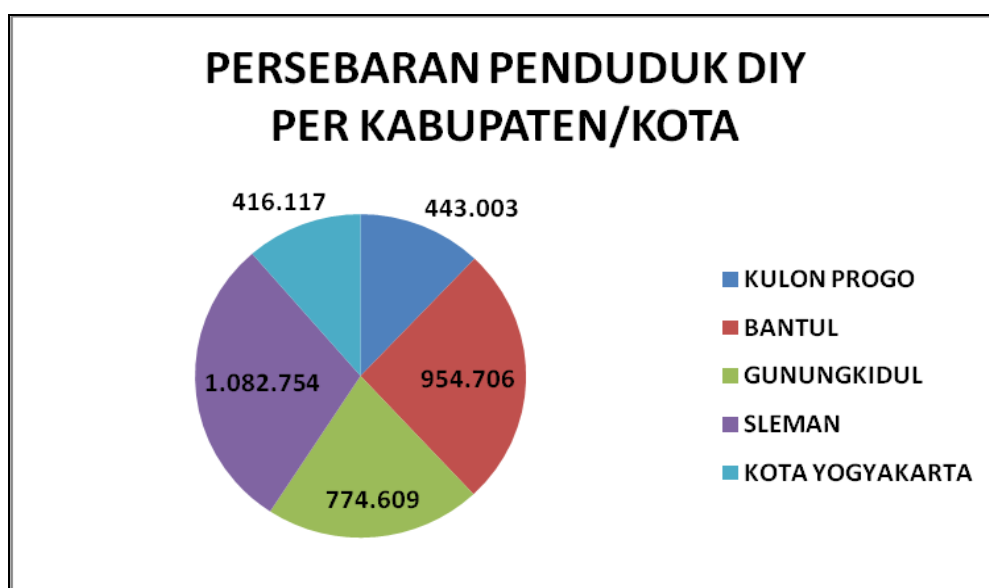


Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/desa
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 berdasarkan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Semester II tahun 2020 (Per 31 Desember 2020) adalah sebanyak 3.671.189 orang. Persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2020 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 1.082.754 orang (29,49%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sejumlah 954.706 orang (26,01%), Kabupaten Gunungkidul sejumlah 774.609 orang (21,10%), Kabupaten Kulon Progo sejumlah 443.007 orang (12,07%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 416.117 orang (11,33%).

Gambar Grafik Persebaran Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2021

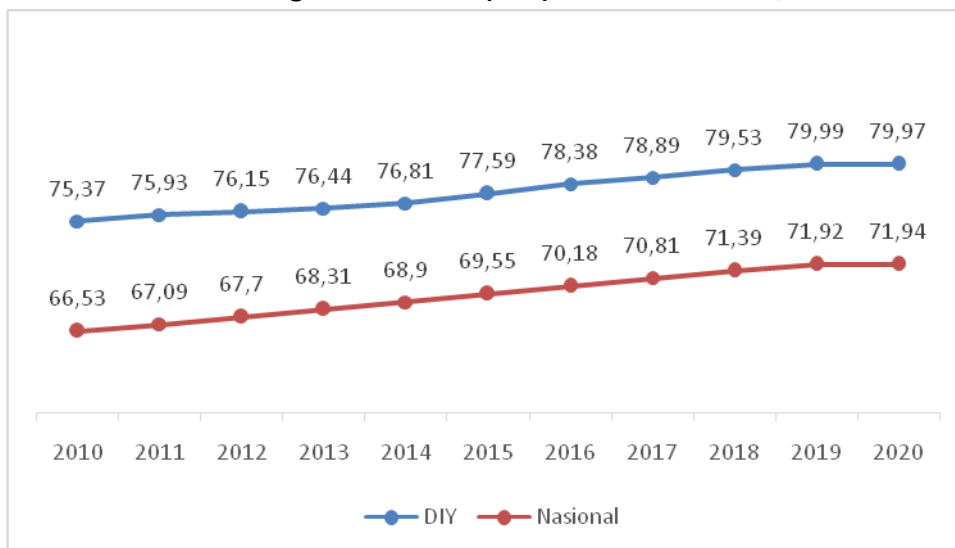
B. CAPAIAN KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian pembangunan manusia DIY sampai dengan tahun 2020 berada pada level 79,97 dan berada dalam kategori "IPM Tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Meskipun sedikit menurun dibanding tahun 2019, namun secara umum capaian IPM DIY terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2020. Selama satu dekade, IPM DIY meningkat dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 79,97 pada tahun 2020 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,59% setiap tahunnya. Penurunan capaian IPD DIY pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan indeks pada dimensi standar hidup yang layak yang tidak mampu dikompensasi oleh kenaikan indeks pada kedua dimensi yang lain yakni kesehatan dan pengetahuan. Daya beli penduduk selama masa pandemi Covid-19 menurun tajam sehingga pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan tercatat lebih rendah dari tahun 2019. Meskipun demikian, capaian IPM

DIY tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan level IPM nasional dan menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2010-2020



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

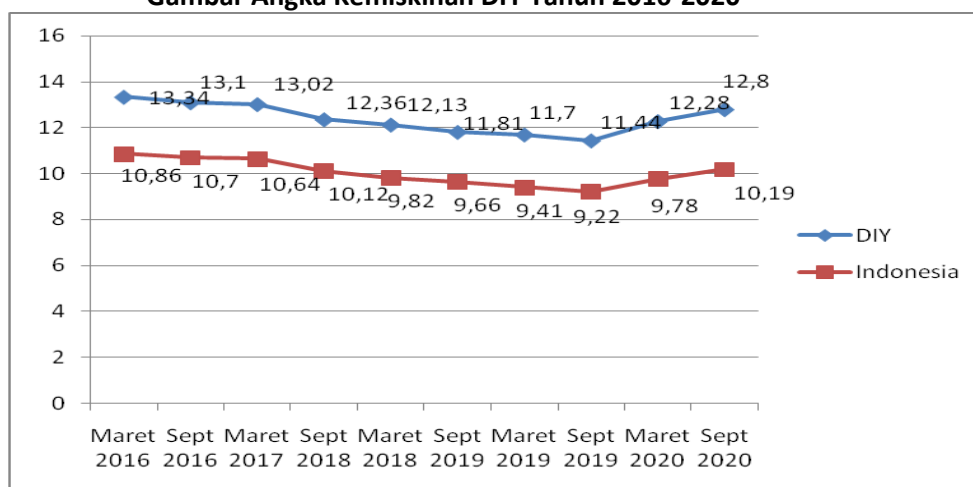
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY
Menurut Komponen, 2015-2020**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Usia Harapan Hidup/UHH (Tahun)	74,68	74,71	74,74	74,82	74,92	74,99
Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)	15,03	15,23	15,42	15,56	15,58	15,59
Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)	9,00	9,12	9,19	9,32	9,38	9,55
Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rp)	12.684	13.229	13.521	13.946	14.394	14.015
IPM	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97
Pertumbuhan IPM (%)	1,02	1,01	0,65	0,81	0,74	-0,03

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

2. Angka Kemiskinan

Gambar Angka Kemiskinan DIY Tahun 2016-2020

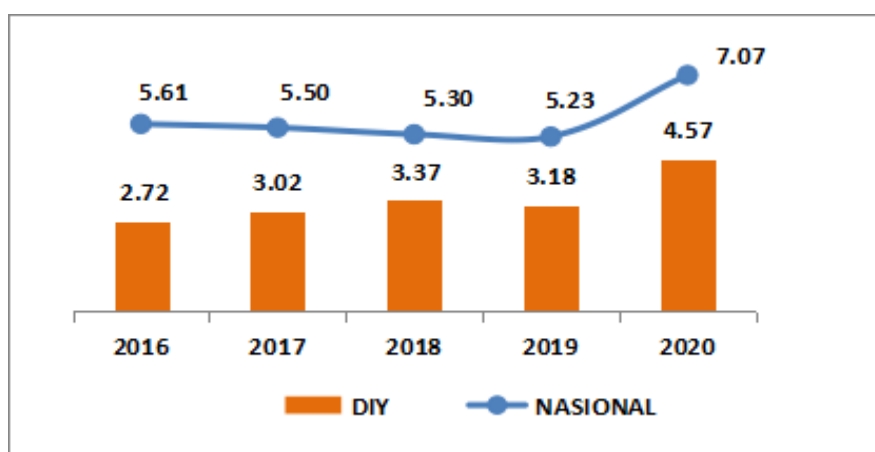


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

3. Angka Pengangguran

Pada tahun 2020 penganggur berpendidikan SMA dan SMK masih mendominasi yaitu mencapai 53,48% diposisi kedua adalah penganggur berpendidikan tinggi (diploma & universitas) sebesar 24,55% diikuti dengan penganggur berpendidikan SMP dibawah 21,96%. Tingginya penganggur berpendidikan SMA dan SMK disebabkan karena jumlah lulusan yang semakin banyak dan mereka berada pada masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mencari dan memilih pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan DIY Tahun 2016-2020



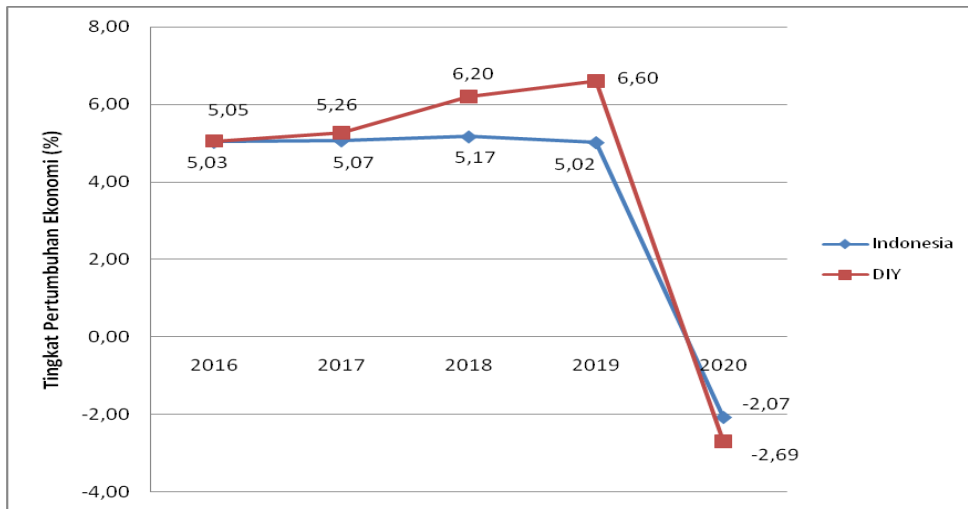
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Berdasarkan graifik di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY masih berada dibawah TPT Nasional. TPT DIY tahun 2016 sebesar 2,72% dan nasional sebesar 5,61%, sedangkan TPT DIY tahun 2020 sebesar 4,57 % dan nasional sebesar 7,07%. Namun demikian TPT harus diupayakan untuk tidak cenderung naik.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan kondisi perekonomian suatu daerah ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kapasitas daerah tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa. Indikator yang mengukur kapasitas ekonomi tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika kapasitas tersebut meningkat yang berarti secara riil jumlah produksi barang dan jasa meningkat akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi positif. Pada tahun 2020, nilai PDRB DIY sebesar Rp138,388 triliun atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp101,679 triliun. Perekonomian DIY selama 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,69 persen (c-to-c), berbeda arah pertumbuhan dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,60 persen. Secara sektoral, kontraksi terutama dipicu oleh lapangan usaha transportasi serta penyediaan akomodasi dan makan-minum. Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen mengalami kontraksi, termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.

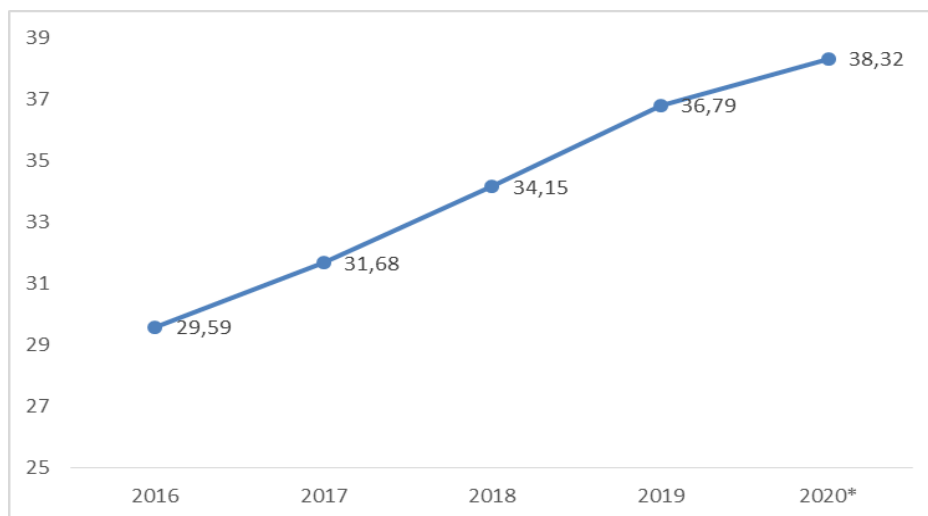
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Indonesia Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: BPS Provinsi DIY

5. Pendapatan Per Kapita

Nilai PDRB per Kapita DIY Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



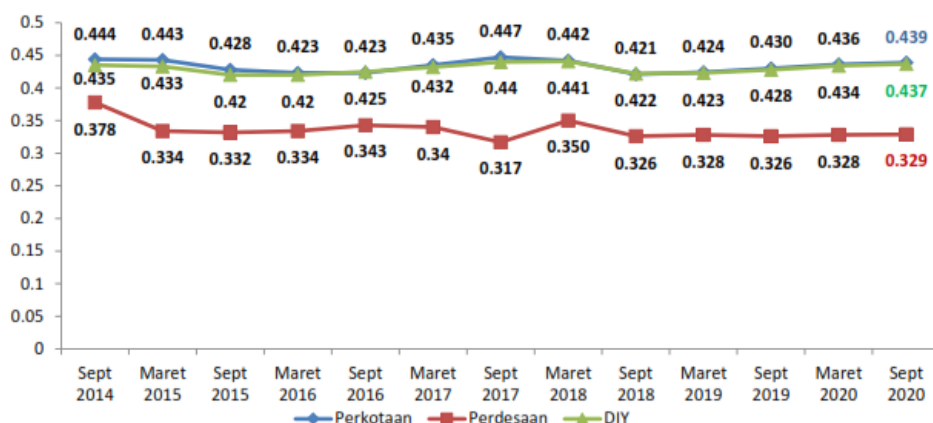
Sumber: BPS Provinsi DIY (2020) dan olahan

Keterangan: *) proyeksi

Meskipun mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, namun nilai PDRB ADHB per kapita di DIY pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan menggunakan data jumlah penduduk Sensus Penduduk 2020 (per September 2020), PDRB ADHB per kapita tahun 2020 sebesar Rp38,32 juta yang meningkat Rp1,53 juta dari Rp36,79 juta pada tahun 2019.

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Bulan September 2014 – September 2020



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya. Angka Gini Ratio DIY pada September 2020 tercatat sebesar 0,437 atau naik 0,003 poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 0,434. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, angka tersebut termasuk pada kategori ketimpangan sedang. Hal ini tercermin dari persentase pengeluaran kelompok 40 persen pendudukterbawah yang besarnya mencapai 15,66 persen dari totalpengeluaran penduduk DIY.

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Urusan Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah DIY 2020

No	Wilayah	Penduduk DIY 16-18 th	Murid Keseluruhan					APK (Termasuk Paket C %)
			SMA	SMK	MA	Paket C	Jumlah	
1	Bantul	39.846	14.050	16.821	5.766	210	36.847	92.47
2	Sleman	46.702	14.905	20.515	6.262	236	41.918	89.75
3	Gunungkidul	30.553	7.491	17.223	2.166	67	26.947	88.19
4	Kulon Progo	18.898	4.270	11.293	2.226	23	17.812	94.25
5	Yogyakarta	19.510	16.115	10.800	2.242	480	29.637	151.90
	DIY	155.509	56.831	76.652	18.662	1.016	153.161	98.49

Sumber: Data Dikpora 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah DIY 2020

No	Wilayah	Penduduk DIY 16-18 th	Murid Usia 16-18 Tahun					APM (Termasuk Paket C %)
			SMA	SMK	MA	Paket C	Jumlah	
1	Bantul	39.846	11.296	14.047	4.546	29	29.918	75,72
2	Sleman	46.702	11.357	17.644	4.198	104	33.303	76,74
3	Gunungkidul	30.553	5.401	15.077	1.587	69	22.134	71,79

No	Wilayah	Penduduk DIY 16-18 th	Murid Usia 16-18 Tahun					APM (Termasuk Paket C %)
			SMA	SMK	MA	Paket C	Jumlah	
4	Kulon Progo	18.898	3.928	7.173	1.302	9	12.412	65,31
5	Yogyakarta	19.510	12.622	12.537	1.948	64	27.171	137,21
	D.I.Yogyakarta	155.509	44.604	66.478	13.581	275	124.938	81.90

Sumber: Data Dinas Dikpora 2021

Jumlah Siswa Disabilitas Sekolah Inklusi

No	Kabupaten/Kota	SD Inklusi			SMP Inklusi			SMA Inklusi			SMK Inklusi			Total
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
1	Kab. Bantul	360	156	516	93	25	118	17	13	30	10	7	17	681
2	Kab. Gunungkidul	131	53	184	77	29	106	8	1	9	8	1	9	308
3	Kab. Kulon Progo	101	36	137	11	6	17	3	4	7	1	2	3	164
4	Kab. Sleman	142	53	195	11	2	13	19	12	31	6	2	8	247
5	Kota Yogyakarta	144	84	228	7	5	12	45	60	105	42	56	98	443
	Jumlah total	878	382	1260	199	67	266	92	90	182	67	68	135	1.843

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

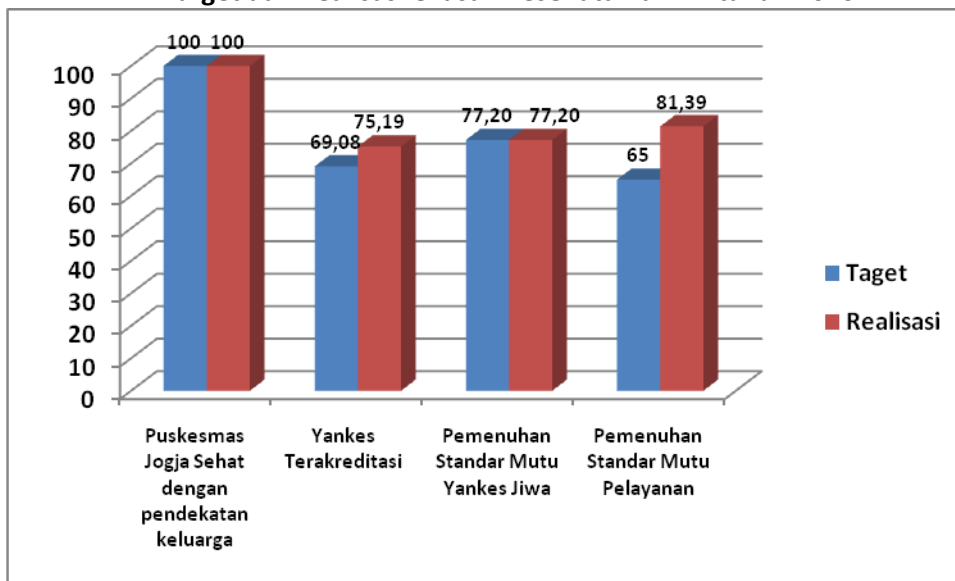
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapat layanan di SLB

No	Kabupaten/Kota	TKLB			SDLB			SMPLB			SMALB			Total
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
1	Kab. Bantul	21	15	36	451	262	713	228	169	397	214	142	356	1.502
2	Kab. Gunungkidul	4	4	8	324	207	531	138	91	229	50	58	108	876
3	Kab. Kulon Progo	11	4	15	132	109	241	102	51	153	36	34	70	479
4	Kab. Sleman	30	16	46	520	302	822	231	167	398	175	126	301	1.567
5	Kota Yogyakarta	15	8	23	162	108	270	106	62	168	71	51	122	583
	Jumlah	81	47	128	1589	988	2.577	805	540	1345	546	411	957	5.007

Sumber: Data Dinas Dikpora 2021

2. Urusan Kesehatan

Target dan Realisasi Urusan Kesehatan di DIY tahun 2020



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Faktor pendorong tercapainya target puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga pada tahun 2020 adalah:

1. Kapasitas Petugas meningkat sebagai hasil dari Pelatihan PISPK
2. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk mendukung tercapainya target puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga serta Dukungan APBD Kabupaten untuk peningkatan kapasitas puskesmas dalam pelaksanaan PISPK
3. Target 121 puskesmas melaksanakan PISPK, terealisasi 121 puskesmas (100%). Pelaksanaan PISPK telah mencapai target, karena kegiatan yang difasilitasi APBD provinsi, dukungan APBN dan APBD kabupaten/kota untuk peningkatan kapasitas puskesmas dalam pelaksanaan PISPK (bimtek, koordinasi dan monev), dukungan BOK, BLUD, kapitasi puskesmas dan APB Desa untuk penerapan PISPK di Puskesmas.

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu diukur dengan persentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi pada tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 69,08% telah terealisasi sebesar 75,19 % dengan realisasi capaian sebesar 108,84%.

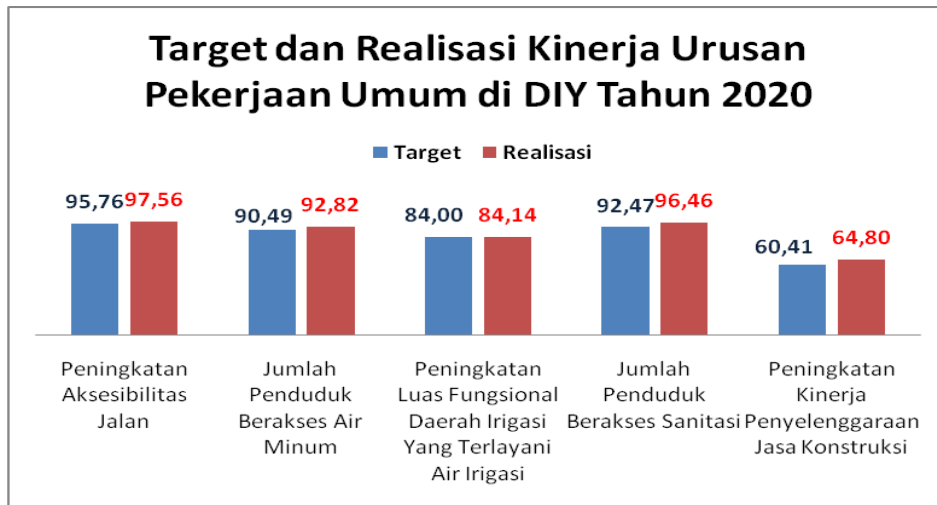
Gambar Grafik Data Kejadian Luar Biasa di DIY Tahun 2020



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

3. Urusan Pekerjaan Umum

Gambar Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum di DIY Tahun 2020



Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

Tabel Data Penduduk DIY Terlayani Air Minum Tahun 2020

No	Kabupaten	Perpipaan	Non Perpipaan	Belum Ada Akses
1	Sleman	340.444	875.391	16.763
2	Bantul	155.221	823.483	51.294
3	Yogyakarta	100.658	335.278	-
4	Gunung Kidul	268.540	270.788	209.947
5	Kulon Progo	154.111	279.546	826
Jumlah		1.018.973	2.584.486	278.829
Total Akses Air Minum		3.603.459		
Capaian Akses		92,82%		

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

Gambar Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Yang Terbangun di DIY Tahun 2020



Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2021

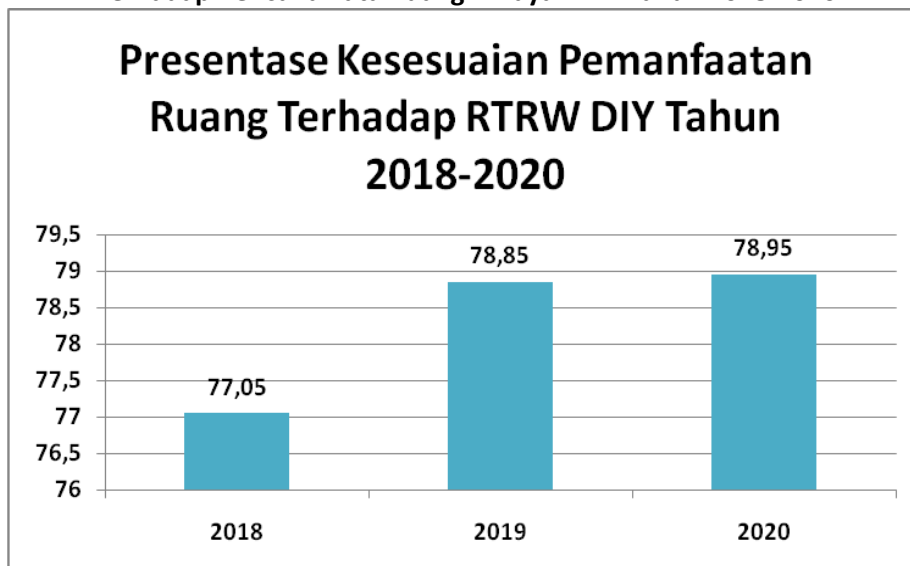
Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional)

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	Volume yang masuk (ton/hari)
1	Kota Yogyakarta	1	268,38
2	Kabupaten Bantul		136,10
3	Kabupaten Sleman		277,44
4	Kabupaten Gunungkidul	1	47,61
5	Kabupaten Kulon Progo	1	43,20
Jumlah Total		3	772,73

Sumber : Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2021

3. Urusan Penataan Ruang

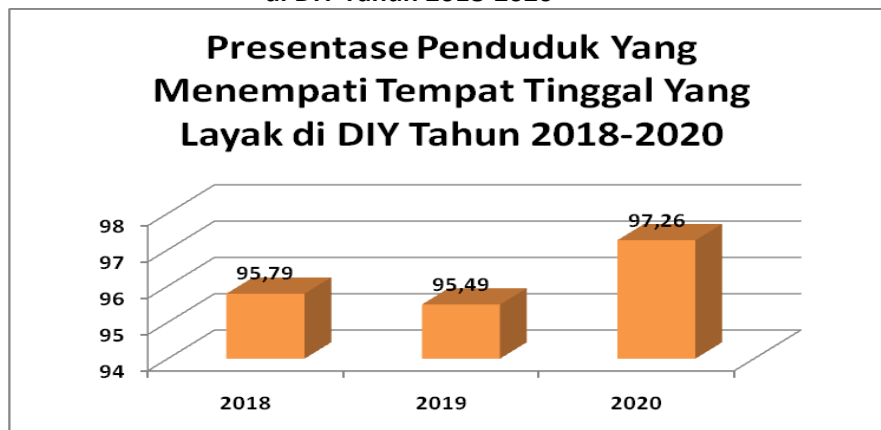
Grafik Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Grafik Persentase Penduduk Yang Menempati Tempat Tinggal Yang Layak di DIY Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020

LOKASI	DATABASE KAB	TER TANGANI TH 2017	TER TANGANI TH 2018	TER TANGANI TH 2019	PENANGANAN RTLH 2020					SDH TER TANGANI TH 2020
					DAK	BSPS	KAB/ KOTA	CSR	PROP	
Kota Yogyakarta	2.797	227	488	552	139	150	50	6	0	345
Kab. Kulon Progo	14.891	2.106	2.005	2.400	111	708	250	24	0	1.093
Kab. Bantul	5.703	2.101	1.848	2.361	138	1.577	0	7	0	1.722
Kab. Sleman	16.347	1.863	1.447	2.130	165	1.038	306	27	0	1.536
Kab. Gunungkidul	25.840	912	1.934	3.112	151	1.527	0	22	161	1.861
JUMLAH	65.578	7.209	7.722	10.555	704	5.000	606	86	161	6.557

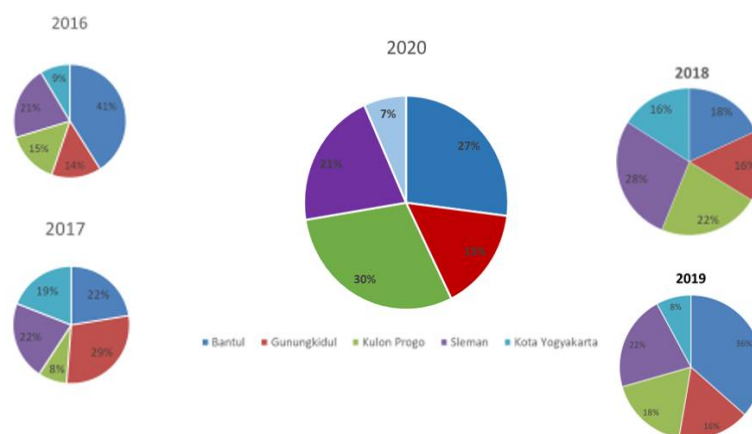
Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Grafik Rerata Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan di DIY Tahun 2018-2020



Sumber: Satpol PP DIY, 2021

Trend Kejadian Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 s.d 2020



Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY, 2020

Pada tahun 2020 terdapat 26 orang korban luka dan 3 orang meninggal, sedangkan untuk korban bencana pandemi khususnya Covid-19 pada tahun 2020 tercatat meninggal dunia sebesar 260 jiwa. Secara kewilayahan, bencana alam terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di DIY meskipun dengan intensitas yang berbeda. Pada tahun 2020 bencana alam lebih sering terjadi di Kabupaten Kulonprogo sebesar 30% dan di Kabupaten Bantul sebesar 27%, Kabupaten Sleman 21%, Kabupaten Gunungkidul 15%, dan Kota Yogyakarta 7%.

Strategi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Strategi ini dipilih karena keterkaitan yang sangat erat antara peningkatan kapasitas dengan penurunan risiko bencana. Ada tiga faktor dari indeks risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Kapasitas merupakan faktor yang layak (*feasible*) diubah atau ditingkatkan seiring dengan program pembangunan, sedangkan faktor-faktor ancaman dan kerentanan cukup sulit diubah dalam jangka waktu lima tahun pembangunan.

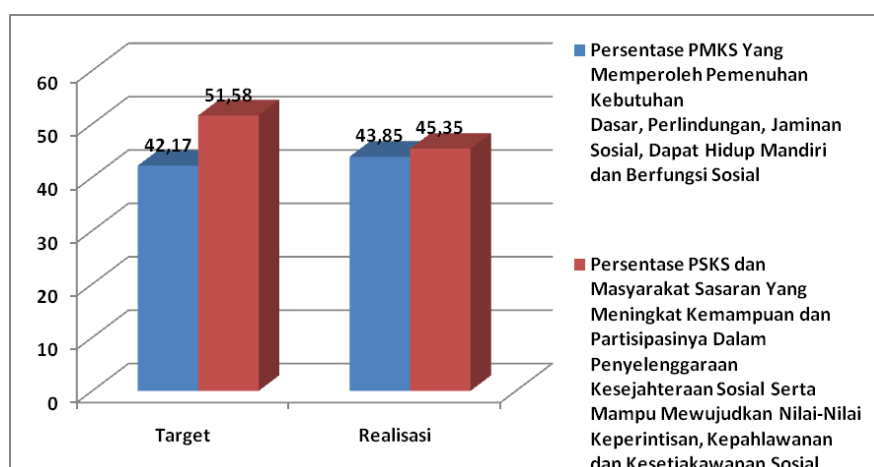
Gambar Grafik Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2018-2020



Sumber: Bakesbangpol DIY, 2021

6. Urusan Sosial

Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosial di DIY Tahun 2020



Sumber: Dinas Sosial DIY, 2021

**Jumlah Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Sosial di DIY Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Penerima Layanan SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	485
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	280
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	1.324
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	415
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	2.832

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2021

8. Urusan Tenaga Kerja

Tahun 2020 capaian realisasi indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan sedikit melampaui target yaitu sebesar 100,57%. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 1.575 orang dengan realisasi hingga 2020 sebesar 1584 orang. Apabila capaian 2020 dibandingkan target akhir tahun pada RPJMD yaitu tahun 2022 maka capaiannya sebesar 60,34%. Indikator ini bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,62% (capaian tahun 2019 sebesar 106,19%). Capaian hingga tahun 2020 sebanyak 1.584 orang dengan rincian penempatan pada tahun 2019 sebanyak 1.115 orang bertambah 469 penempatan pada tahun 2020. Keberhasilan capaian indikator ini dengan mengoptimalkan lulusan pelatihan dan pemagangan tahun sebelumnya untuk ditempatkan serta dari lulusan pelatihan kegiatan selain APBD.

Capaian realisasi indikator pada sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yaitu jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2020 ini sebesar 143,33% sehingga sangat baik. Indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun 2019 mengalami peningkatan 33,33% (capaian tahun 2019 110%). Berdasarkan dokumen RPJMD TA 2017-2022, indikator jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 30 kasus dan terealisasi sebesar 43 kasus sehingga capaian realisasinya sebesar 143,33%. Melonjaknya jumlah kasus hubungan industrial sebagai dampak pandemic covid-19 dan keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh bertambahnya sumber daya manusia Mediator Hubungan Industrial dan pemanfaatan Tehnologi Informasi (TI) yaitu penyelesaian kasus secara daring dan luring.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

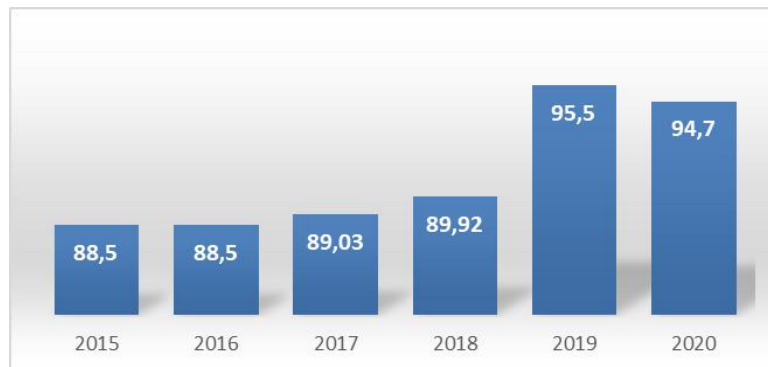
Gambar Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di DIY Tahun 2017-2020



Sumber: DP3AP2 DIY, 2021

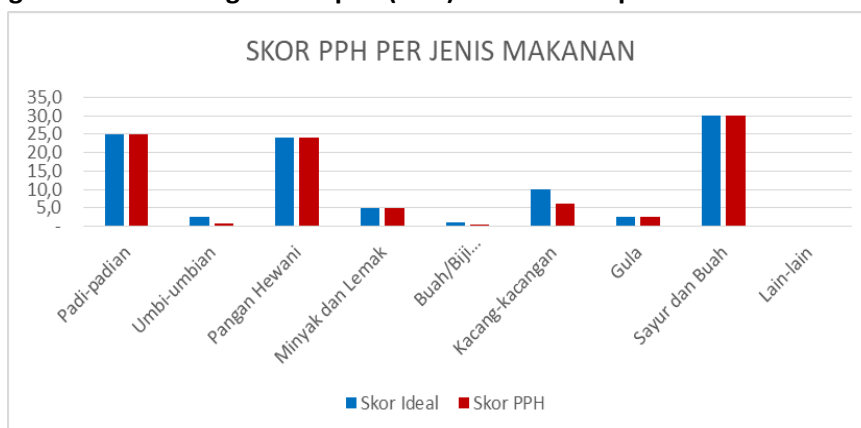
10. Urusan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2015-2020



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021 (data diolah)

Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

11. Urusan Pertanahan

Tabel Rekapitulasi Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

NO	KAB/KOTA	SULTAN GROUND	PAKUALAMAN GROUND	JUMLAH BIDANG
1	YOGYAKARTA	438	68	506
2	BANTUL	3.432	0	3.432
3	KULON PROGO	1.286	288	1.574
4	GUNUNGGIDUL	4.046	0	4.046
5	SLEMAN	4.486	0	4.486
TOTAL BIDANG		13.688	356	14.044

Sumber: Dinas PTR DIY, 2021

Sedangkan inventarisasi terhadap tanah desa yang dilakukan oleh Dinas PTR, terdapat 50.279 bidang tanah yang tersebar di kabupaten/kota DI Yogyakarta. Adapun hasil inventarisasi terhadap tanah desa yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

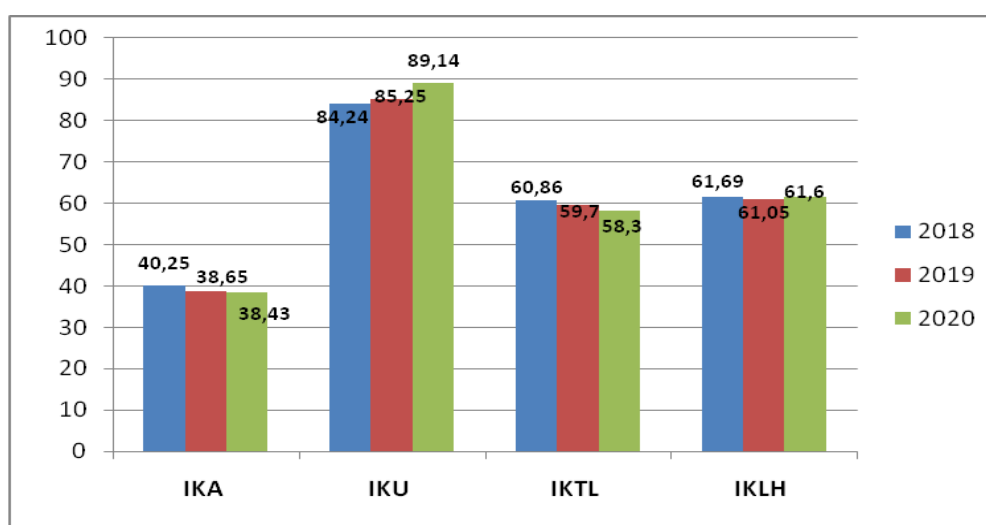
Tabel Inventarisasi Terhadap Tanah Desa

No	Kab	Jumlah Bidang	Tanah Desa Bersertifikat	Sertifikat Terverifikasi	Sertifikat Belum Diverifikasi	Pendaftaran Sertifikat Tahun 2020
1	Bantul	15.743	2.117	390	1.727	50
2	Kulon Progo	4.156	3.649	3.649	0	0
3	Gunungkidul	10.882	3.283	1.277	2.006	50
4	Sleman	19.498	7.007	7.007	0	50
Jumlah		50.279	16.056	12.323	3.733	150

Sumber: Dinas PTR DIY, 2021

12. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup di DIY Tahun 2018-2020



Sumber: DLHK DIY, 2021

13. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Grafik Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Adminduk di DIY Tahun 2018-2020



Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2021

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

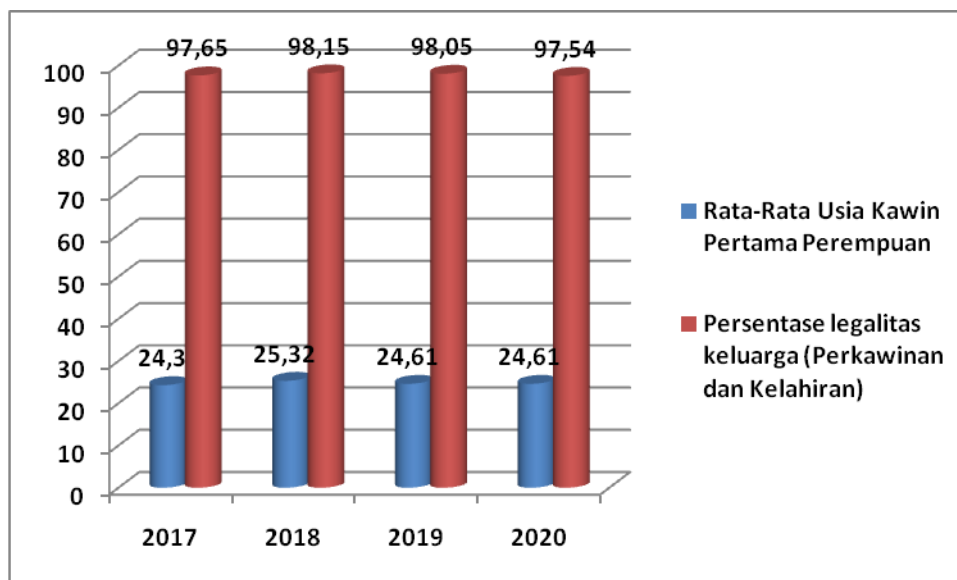
Tabel Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa(Kalurahan) dan Kelurahan Tahun 2020

NO	Kegiatan	Jumla Desa (Kalurahan)/Kelurahan
1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sampai tingkat Kabupaten/Kota	6
2	Fasilitasi dan pembinaan LPMD/K melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat baik dibidang fisik (pembangunan sarana prasarana) maupun non fisik (penyuluhan terkait Pekat, Narkoba, Fanatisme dan pencegahan penyebaran wabah virus covid 19	14
3	Bumdes yang dilakukan pembinaan dan ditingkatkan perannya dalam pelatihan kebijakan bisnis plan dan manajemen pengelolaan BUMDes	6
4	Pemberdayaan masyarakat dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kota Yogyakarta (Kegiatan Segoro Amarto)	8
5	Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Global Gotong Royong (G2R) Tetrapeneur melaksanakan ekspose produk unggulan, sosialisasi tetra 3 G2RT, jaringan offline kemitraan dan penjualan produk unggulan, jaringan online kemitraan dan penjualan produk unggulan, penjualan ekspor produk unggulan, penjualan mitra produk unggulan dan <i>Table Top</i> produk unggulan.	5

Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Capaian Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
di DIY Tahun 2017-2020



Sumber: DP3AP2 DIY, 2021

16. Urusan Perhubungan

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan di DIY Tahun 2017-2020



Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2021

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY terdiri dari satu sasaran yaitu: Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi dengan indikator peringkat keterbukaan informasi badan publik yang dikeluarkan Komisi Informasi Pusat. Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menargetkan masuk peringkat 6 dalam cluster informatif. Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pusat Republik Indonesia Nomor 09./KEP/KIP/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada badan Publik Tahun 2020, nilai skor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada peringkat 9 atau dengan nilai 93,83 berada cluster informatif untuk Badan Publik kategori Pemerintah Provinsi. Capaian realisasi kerjanya adalah sebesar 66.67%.

Sampai tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika sudah mengintegrasikan 10 (sepuluh) urusan ke dalam Sistem Informasi Eksekutif melalui *Integrated Development Management Center* (IDMC) (idmc.jogjapro.go.id), yakni urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan pangan, urusan Sosial, urusan Keamanan dan Ketertiban Umum, urusan Tata Ruang, urusan Pertanahan, urusan Kominfo, urusan Perhubungan dan urusan Kependudukan. Melalui sistem informasi yang terintegrasi ini, akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Di dalam IDMC ini juga mengintegrasikan aplikasi layanan e-Lapor yang merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik dan informasi *surveillance* yang terkoneksi ke 26 titik CCTV yang ada di wilayah DIY.

18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu koperasi yang berbadan hukum provinsi maupun kabupaten/kota selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi Aktif	2.427	1.782	1.926	1.722	1.758
2	Koperasi tidak Aktif	311	598	63	196	180
3	Modal Sendiri (Rp Juta)	1.139.942	1.200.158	1.425.918	1.625.568	1.595.511
4	Modal Luar (Rp Juta)	1.835.173	2.085.166	2.262.263	2.512.343	2.188.554
5	Volume Usaha (Rp Juta)	4.473.800	3.678.342	4.394.362	4.325.218	4.142.871
6	Koperasi Primer	2.707	2.352	1.963	1.890	1905
7	Koperasi Sekunder	31	28	26	28	30

Sumber: Online Data Sistem, Kementerian Koperasi dan UKM RI per 31 Desember 2020

Salah satu upaya pembinaan UMKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien, disamping itu dengan sentra akan banyak melibatkan UMKM. Dengan pembinaan berbasis sentra ini akan meningkatkan jumlah UMKM secara signifikan, seperti data pada Tabel 3-74.

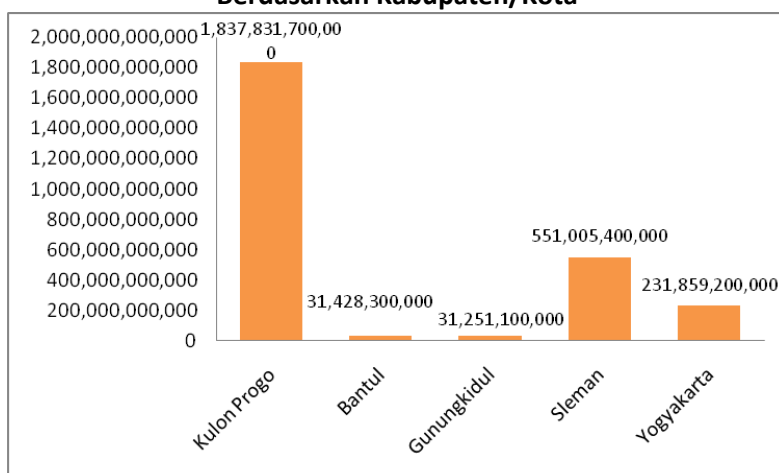
**Tabel Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha
Tahun 2016 - 2020**

No	Skala Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usaha Mikro	130.525	135.799	141.991	143.385	188.033
2	Usaha Kecil	59.655	62.042	64.896	65.533	58.980
3	Usaha Menengah	36.031	37.472	39.196	39.581	30.665
4	Usaha Besar	12.408	12.904	13.498	13.631	10.005
Jumlah		230.047	238.619	248.217	259.581	287.683

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2021

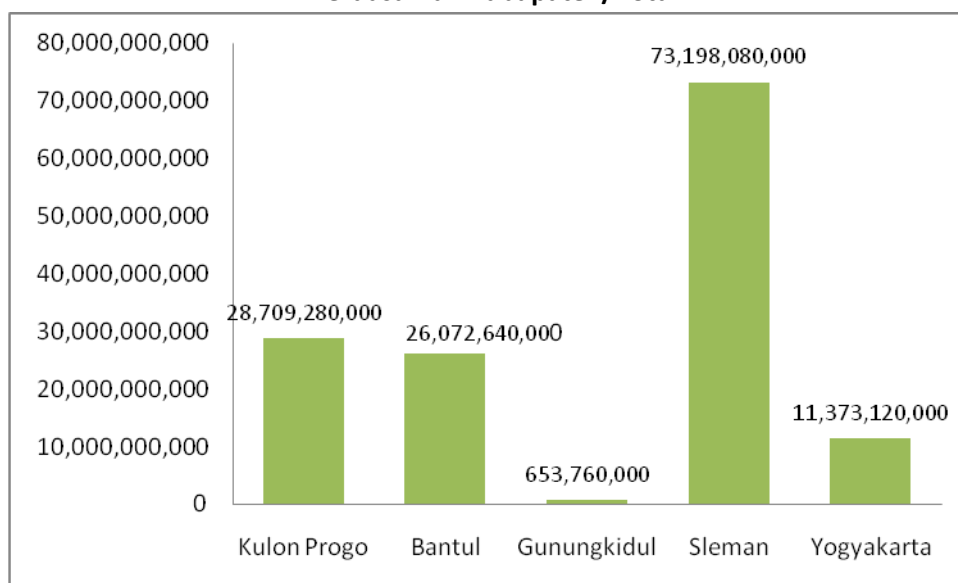
19. Urusan Penanaman Modal

Gambar Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN Tahun 2020 Berdasarkan Kabupaten/Kota



Sumber: DPPM DIY, 2021

Gambar Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA Tahun 2020 Berdasarkan Kabupaten/Kota



Sumber: DPPM DIY, 2021

20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

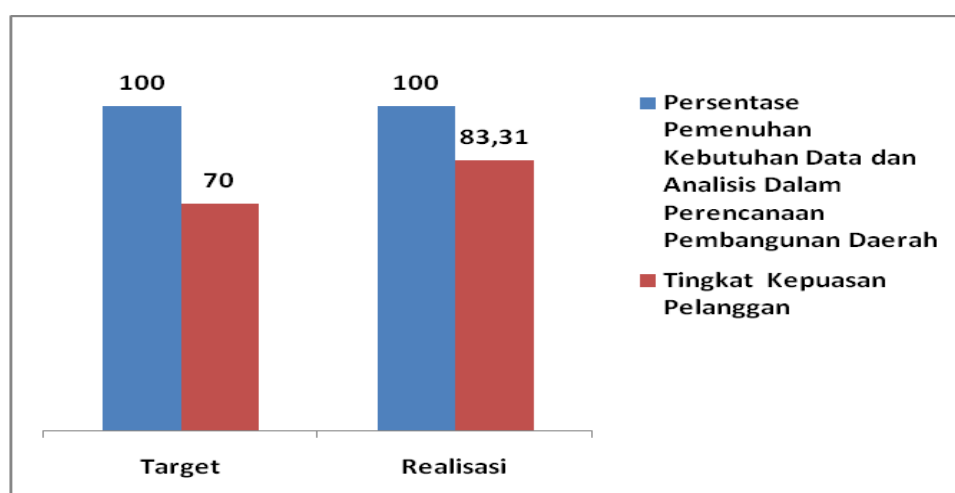
Gambar Grafik Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif di DIY Tahun 2017-2020



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2021

21. Urusan Statistik

Gambar Target dan Realisasi Kinerja Program Urusan Statistik Tahun 2020



Sumber: Bappeda DIY, 2021

22. Urusan Persandian

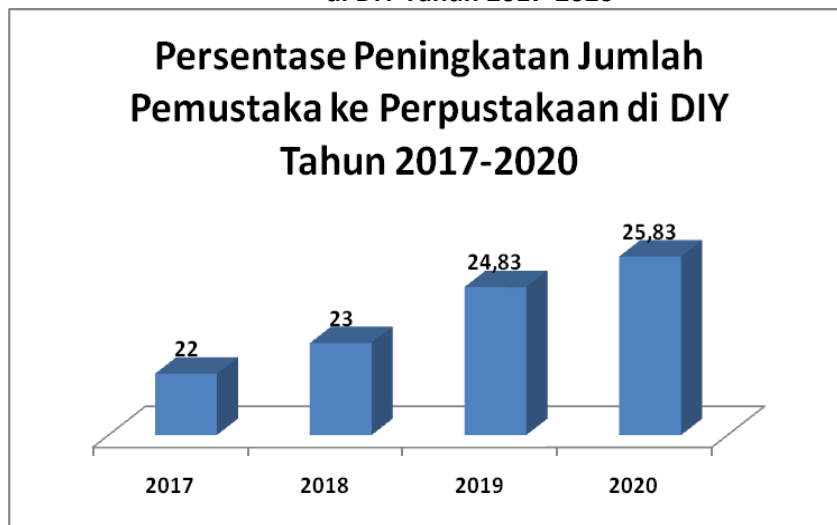
Adapun pelaksanaan urusan persandian di Pemda DIY meliputi:

- Counter Surveillance (pengamanan ruangan) ruang kerja dan ruang rapat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati se-DIY, Sekda DIY, Asisten Setda DIY, serta Sekda dan Asisten Kabupaten/Kota se-DIY serta OPD di lingkungan Pemda DIY;
- Signal Jamming (pengacakan sinyal) pada pelaksanaan event tertentu di Pemda DIY dan di Kabupaten / Kota se-DIY;
- Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT dan laptop berenkripsi);

- d) Fasilitasi layanan *encrypted email* atau surel terenkripsi bagi pimpinan, baik enkripsi surel yang akan dikirim maupun dekripsi surel yang diterima untuk diteruskan kepada pimpinan;
- e) Pengelolaan telepon berbasis *Voip* untuk instansi dilingkungan Pemda DIY;
- f) Pengelolaan Frekuensi UHF untuk penunjang komunikasi di lingkungan Pemda DIY;
- g) Fasilitasi Pengecekan spektrum peralatan sandi milik provinsi/kab/kota.
- h) Pengujian Keamanan Sistem Informasi (*Penetration Testing*) pada Aplikasi yang digunakan oleh OPD di Pemda DIY untuk mengetahui celah kerawanannya.

23. Urusan Perpustakaan

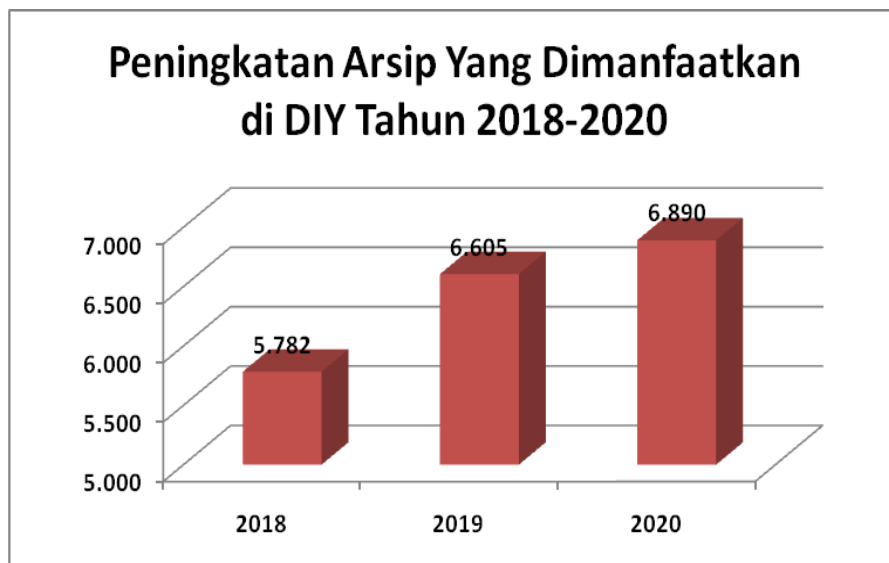
Grafik Persentase Peningkatan Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan di DIY Tahun 2017-2020



Sumber: DPAD DIY, 2021

24. Urusan Kearsipan

Grafik Peningkatan Arsip Yang Dimanfaatkan di DIY Tahun 2018-2020



Sumber: DPAD DIY, 2021

25. Urusan Kelautan Dan Perikanan

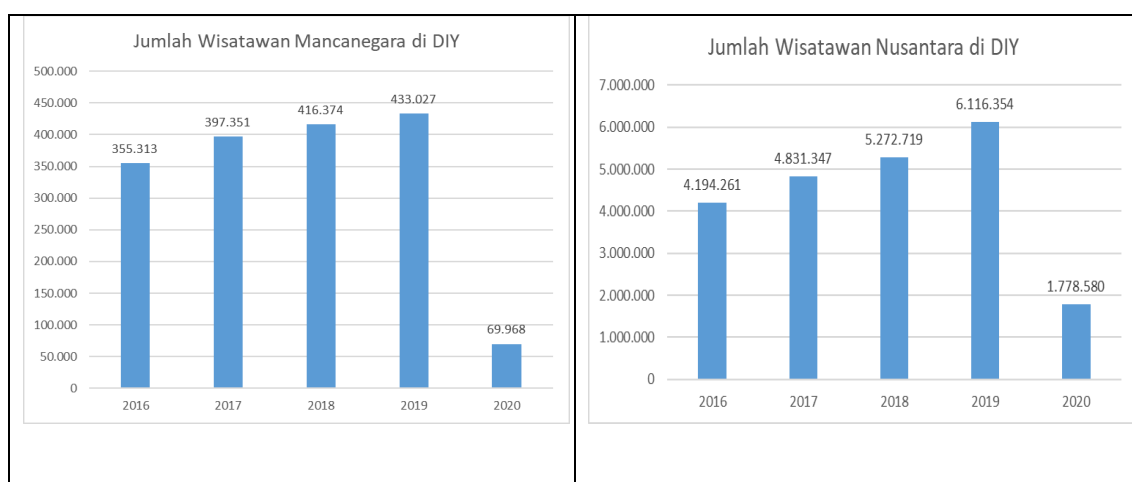
Gambar Grafik Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 – 2020



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2021

26. Urusan Pariwisata

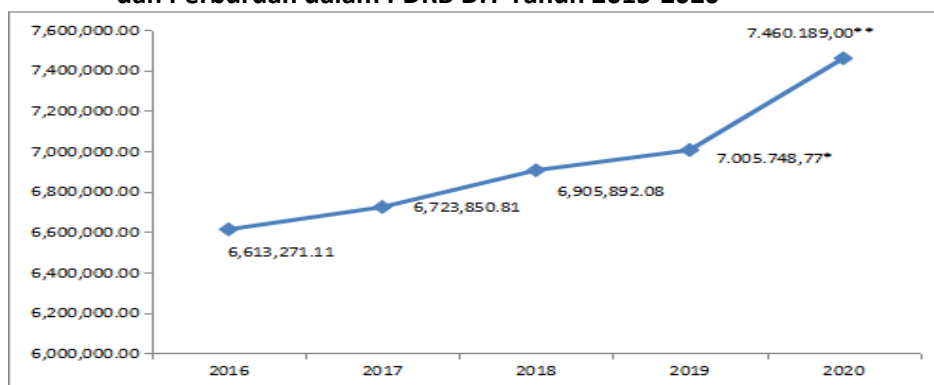
Grafik Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung di DIY Tahun 2020



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2021

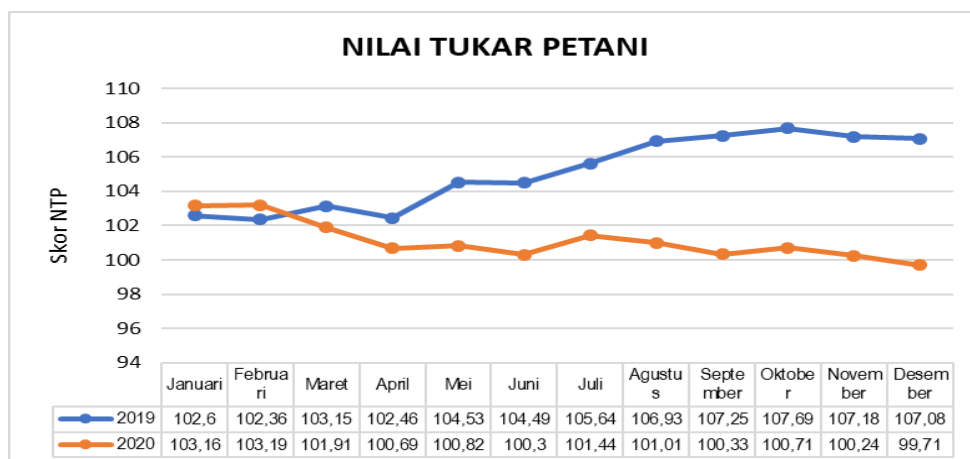
27. Urusan Pertanian

Gambar Nilai Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan dalam PDRB DIY Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2021

Gambar Nilai Tukar Petani Tahun 2019 dan 2020



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

28. Urusan Kehutanan

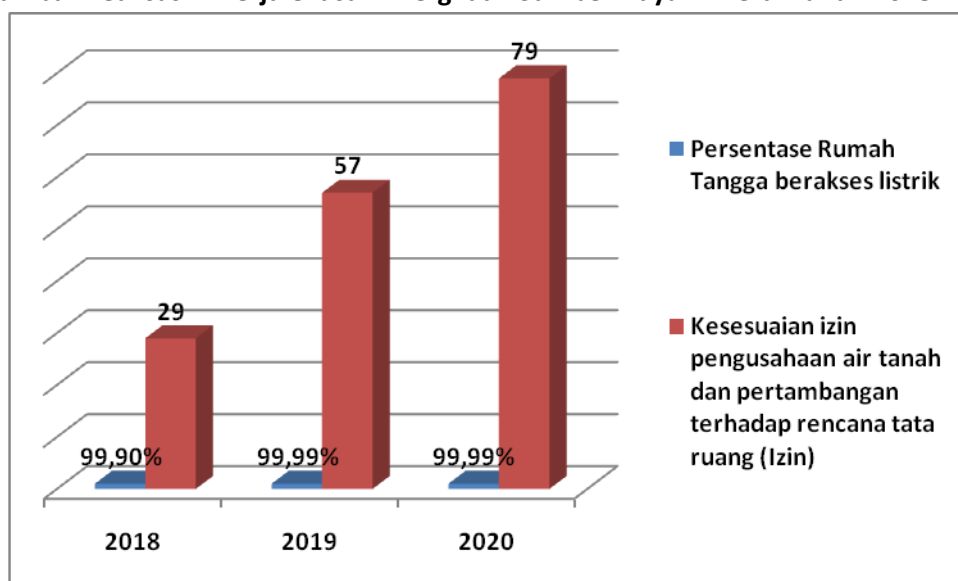
Tabel Produksi Minyak Kayu Putih Tahun 2015 - 2020

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700
2018	44.285	44.296	10.458.285.600
2019	39.316	39.323	9.889.734.500
2020	41.610	40.353	10.756.185.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambar Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

30. Urusan Perdagangan

Tabel Perkembangan Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volume (Juta kg)	56,90	57,01	59,24	53,57	64,17	103,51
Nilai (Juta US \$)	242,47	252,18	296,61	338,02	370,22	417,12
Komoditas	110	88	78	88	94	104
Negara	115	112	112	115	113	111
Eksportir	325	286	314	360	400	373

Sumber: Disperindag DIY, 2021

31. Urusan Perindustrian

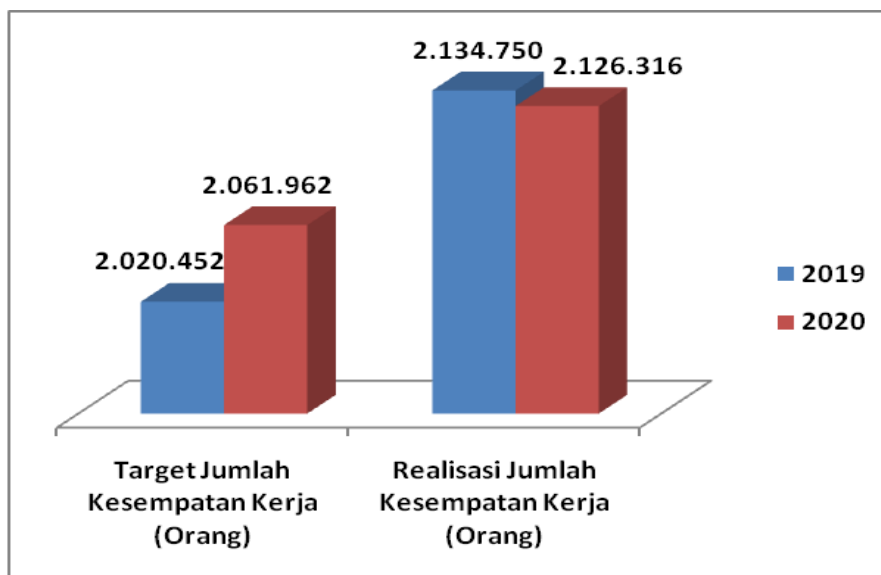
Tabel Perkembangan IKM di DIY Tahun 2016-2020

IKM	2016	2017	2018	2019	2020
Unit usaha (UU)	90.906	91.214	94.840	97.013	96.597
Tenaga kerja (orang)	333.980	330.508	351.425	360.242	355.319
Nilai investasi (Rp Juta)	1.269.897	1.208.564	1.949.721	2.084.560	1.992.422
Nilai produksi (Rp Juta)	3.643.222	12.463.258	12.749.270	13.041.848	12.465.398
Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	1.593.631	8.620.133	7.335.020	7.537.467	7.204.311

Sumber: Disperindag DIY, 2021

32. Urusan Transmigrasi

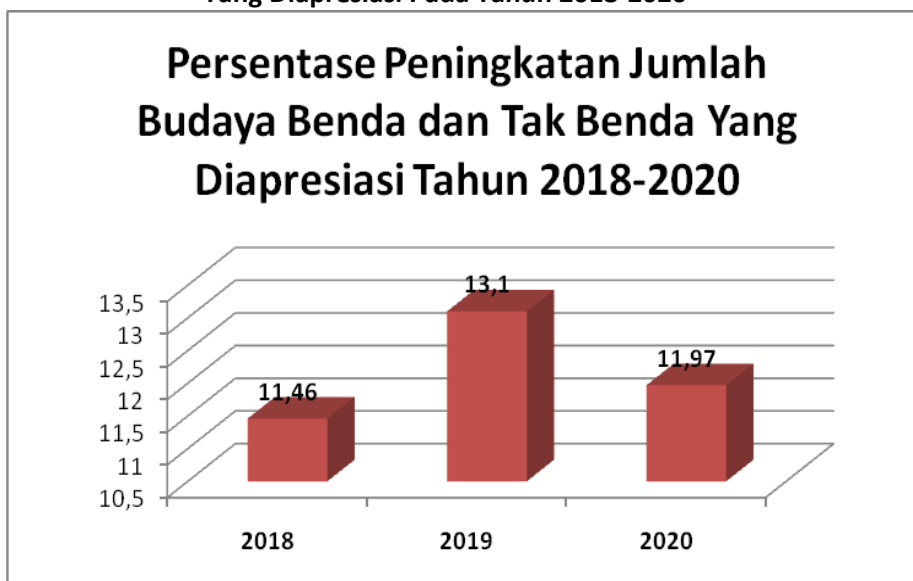
Grafik Target dan Realisasi Kinerja Urusan Bidang Transmigrasi di DIY Tahun 2019-2020



Sumber: Disnakertrans DIY, 2021

33. Urusan Kebudayaan

Grafik Persentase Peningkatan Jumlah Budaya benda dan Tak Benda Yang Diapresiasi Pada Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Tabel Kekayaan Warisan Budaya Benda DIY yang Ditetapkan Pemerintah RI dan UNESCO Tahun 2007-2020

Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
2007	28	-	28
2010	16	-	16
2011	95	-	95
2013	1	-	1
2014	1	-	2
2016	1	-	1
2018	2	-	2
2019	6	-	6
2020	16	-	16
Jumlah	166	-	166

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021

Tabel Warisan Budaya Tak Benda DIY Yang Ditetapkan Pemerintah RI dan UNESCO Tahun 2013-2020

Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
2013	1	-	1
2014	1	-	1
2015	4	-	4
2016	9	-	9
2017	18	-	18

Tahun	Penetapan Nasional	Penetapan Internasional	Jumlah
2018	27	-	27
2019	30	-	30
2020	14	-	14
Jumlah	104	-	104

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2021

D. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY

Tabel Hasil EPPD Atas LPPD DIY Tahun 2011-2019

Tahun LPPD	Peringkat Provinsi	Tahun EPPD	Nilai EPPD	Status
2011	5	2012	2,6554	Tinggi
2012	8	2013	2,493	Tinggi
2013	3	2014	2,7669	Tinggi
2014	7	2015	2,799	Tinggi
2015	8	2016	2,8707	Tinggi
2016	9	2017	3,0012	Sangat Tinggi
2017	9	2018	2,9903	Tinggi
2018	Pemeringkatan belum ada	2019	3,2212	Sangat Tinggi
2019*	Pemeringkatan belum ada	2020	3,2212	Sangat Tinggi

*)Nilai EPPD atas LPPD 2019 masih menggunakan data EPPD 2019 atas LPPD 2018, karena nilai Nilai EPPD atas LPPD 2019 belum ada

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2020, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi LHP atas Laporan Keuangan Nomor 21A/LHP/XVIII.YOG/04/2020, LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 21B/LHP/XVIII.YOG/04/2020 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Nomor 21C/LHP/XVIII.YOG/04/2020. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kesepuluh kalinya sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.

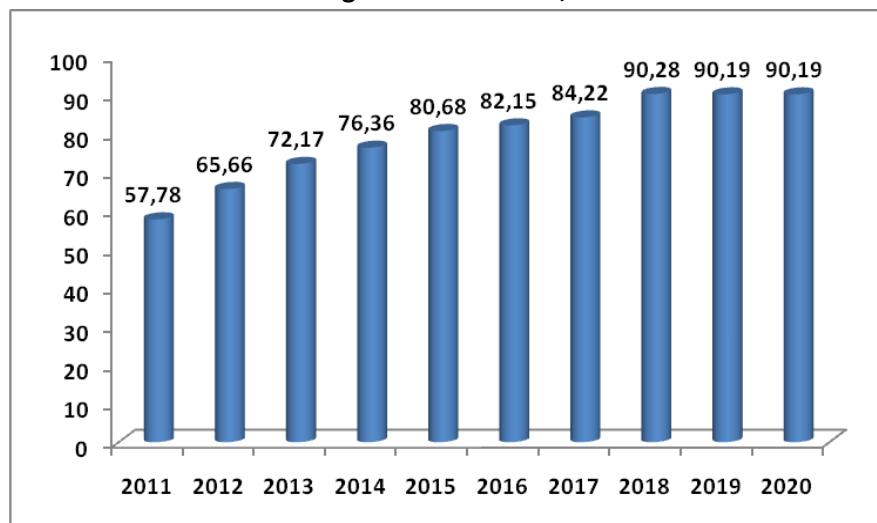


Sumber: BPKA DIY, 2021

E. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Grafik Perkembangan Nilai AKIP DIY, 2011-2020



Sumber: Bappeda DIY, 2021

Keterangan: Tahun 2020 nilai Evaluasi AKIP belum keluar, sehingga menggunakan angka terakhir yang dikeluarkan dari KemenPAN dan RB.

2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan

Tabel Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan, 2019-2020

Indikator	Satuan	Capaian 2019	2020			Target 2022	Capaian 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	%	96,15	82,61 %	84,62 %	102,43 %	91,30	92,68%

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 2021

Tabel Capaian Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan, 2019-2020 di atas menunjukkan bahwa sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan, dengan indikator “Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan”, pada tahun 2020, target sebesar 82,61%, terealisasi melampaui target, yaitu mencapai 84,62%. Dengan capaian tersebut, sehingga persen realisasi sasaran adalah sebesar 102,43%. Evaluasi yang dilakukan terhadap capaian kinerja 26 program keistimewaan pada tahun 2020, terdapat 22 program yang capaiannya telah sesuai target.

Tercapainya target di hampir semua program urusan keistimewaan didukung oleh beberapa faktor seperti; keselarasan program/kegiatan keistimewaan terhadap dokumen perencanaan pusat/daerah, adanya pedoman perencanaan pelaksanaan dan pengendalian keistimewaan dalam bentuk regulasi; serta terbangunnya sinergi dan jejaring yang kuat antara Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintan dan stake holder terkait. Adapun terhadap indikator-indikator program yang pada tahun 2020 belum tercapai, pada umumnya disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19*, seperti pembatalan kegiatan pendukung program yang bersifat massal.

Pada pinsipnya, pengukuran tingkat ketercapaian kinerja indikator program keistimewaan dilakukan untuk memastikan kualitas pelaksanaan program keistimewaan. Kualitas program keistimewaan ini akan menambah nilai *outcome* program keistimewaan. Secara umum, Program-program keistimewaan memiliki dampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

F. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerja Sama Daerah

Pada tahun 2020 Pemda DIY telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat berupa sebanyak 9 (sembilan) Nota Kesepakatan Kerja Sama yaitu di bidang Perindustrian, Penanganan Covid-19, Reforma Agraria, Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Daerah, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Penyelenggaraan Perlindungan Hukum dan HAM, Pendidikan dan Pembangunan di DIY. Untuk Kerja sama dengan Daerah Lain yaitu 2 (dua) Kesepakatan Bersama yaitu antara DIY dengan Kota Samarinda dan Provinsi Bengkulu, dan 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY yaitu Kerja Sama Pengelolaan dan Pengembangan Sarpras air limbah domestik sistem terpusat, Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kamijoro dan 1 Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jateng Terkait Pemanfaatan Galeri Kotagede di

Bandara YIA. Pada tahun 2020 Pemda DIY juga telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga /swasta sebanyak 12 (dua puluh dua) Kesepakatan Bersama dan 10 (sepuluh) Perjanjian Kerja Sama.

2. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Pada tahun 2020 materi koordinasi yang dibahas adalah berkaitan dengan kondisi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari aspek kondusivitas daerah (keamanan, ketertiban dan ketentraman). Instansi vertikal yang terlibat dalam Forkopimda antara lain Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Kanwil Kementerian Agama, Perwakilan Bank Indonesia.

b. Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Materi koordinasi yakni terkait deteksi dini dan cegah dini permasalahan-permasalahan strategis di tingkat lokal, nasional, regional dan global, yang diperkirakan berdampak terhadap situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Instansi vertikal yang terlibat dalam Kominda antara lain Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Hukum dan HAM DIY, Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dan Kanwil Bea Cukai Yogyakarta dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY.

3. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Konflik sosial bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian perseteruan antar umat beragama, antar suku antar etnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat dengan pengusaha, distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat, sehingga potensi konflik sosial yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus diantisipasi sedini mungkin.

Pemda DIY bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, forum-forum kemitraan dan pihak kepolisian memaksimalkan program pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan lembaga organisasi yang lain di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga pencegahan konflik sosial dapat diatasi bersama-sama. Gubernur selaku ketua tim terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretaris Daerah (selaku wakil ketua I tim terpadu penanganan konflik sosial) untuk meningkatkan koordinasi aktif dengan unsur tim terpadu serta meningkatkan intensitas pertemuan tim terpadu penanganan konflik sosial.

G. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

TABEL RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DIY
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	LEBIH/KURANG	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	5.558.125.044.792,93	5.611.715.965.808,71	53.590.921.015,78	100,96
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.799.932.971.064,54	1.876.663.298.063,71	76.730.326.999,17	104,26
4.2.	Dana Perimbangan	2.395.248.332.317,00	2.371.292.926.821,00	(23.955.405.496,00)	99,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.362.943.741.411,39	1.363.759.740.924,00	815.999.512,61	100,06
	JUMLAH	5.558.125.044.792,93	5.611.715.965.808,71	53.590.921.015,78	100,96
5.	BELANJA	5.865.604.964.088,35	5.433.564.049.791,03	(432.040.914.297,32)	92,63
5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.884.017.560.770,72	3.626.470.537.480,02	(257.547.023.290,70)	93,37
5.2.	Belanja Langsung	1.981.587.403.317,63	1.807.093.512.311,01	(174.493.891.006,62)	91,19
	JUMLAH	5.865.604.964.088,35	5.433.564.049.791,03	(432.040.914.297,32)	92,63
	SURPLUS/(DEFISIT)	(307.479.919.295,42)	178.151.916.017,68	485.631.835.313,10	(57,94)
6.	PEMBIAYAAN	307.479.919.295,42	306.122.988.195,42	(1.356.931.100,00)	99,56
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	425.069.919.295,42	423.712.988.195,42	(1.356.931.100,00)	99,68
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	425.069.919.295,42	423.712.988.195,42	(1.356.931.100,00)	99,68
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	117.590.000.000,00	117.590.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	117.590.000.000,00	117.590.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	307.479.919.295,42	306.122.988.195,42	(1.356.931.100,00)	99,56
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	484.274.904.213,10	484.274.904.213,10	0,00

Sumber: BPKA DIY, 2021

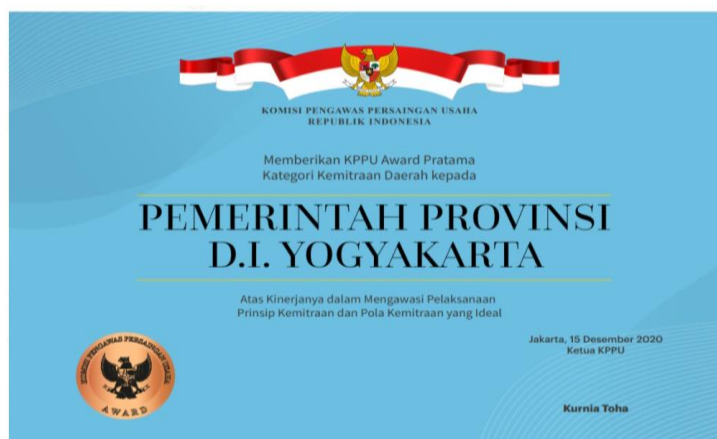
H. INOVASI DAERAH

Sepanjang tahun 2020 Pemda DIY mendapatkan penghargaan/penilaian secara nasional berkaitan dengan capaian tata kelola pemerintahan, diantaranya adalah:

- 1) Pemda DIY mendapat penghargaan "Praktik Baik Reformasi Birokrasi Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2020" oleh Kemenpan RB dan KPK RI.
- 2) Penghargaan "Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)" dari Kemenpan RB yakni Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman, Balai Pelatihan Kesehatan DIY, dan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial DIY.
- 3) Terdapat inovasi pelayanan publik Pemda DIY yang berhasil masuk TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Menpan RB No. 192 Tahun 2020 Tentang TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dan Pemenang *Outstanding Achievement Of Public Service Innovation 2020* yaitu Melintasi Batas Ruang Kelas Bersama Jogjabelajar Class – Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan JOGJAPLAN: Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ORDINATE (Konsisten, Responsif, Dinamis, dan Akuntabel) dengan e-Planning – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.
- 4) Penghargaan Anugerah KPAl yaitu satu dari lima Pemda setingkat provinsi yang dinilai memiliki komitmen dalam upaya perlindungan anak.
- 5) Penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kemenkum HAM RI.

- 6) Penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI atas upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Bidang Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja Inklusif.
- 7) Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Klasifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
- 8) Penilaian Sistem Merit dengan predikat Sangat Baik tahun 2020 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- 9) Penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia yaitu Peringkat Pratama untuk Kategori Kemitraan Daerah atas Kinerjanya dalam Mengawasi Pelaksanaan Prinsip Kemitraan dan Pola Kemitraan yang Ideal.

Gambar Penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2020




Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY tahun 2020 kami sampaikan dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Kami menyadari masih terdapat program dan kegiatan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik dari jajaran pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat. Untuk itu Pemda DIY memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungannya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.

Yogyakarta, 31 Maret 2021
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X